



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2007, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2007 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2007 yang dimulai dari 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali.
- (2) Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD unit dan merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali membahas RKPD Tahun 2007 untuk menetapkan kebijakan umum prioritas anggaran.
- (2) SKPD melaksanakan RKPD Tahun 2007 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan RKA-SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - b. Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali;
 - c. Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan RKPD Tahun 2007.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI
TAHUN 2007

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat tentang kondisi umum daerah, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan kebijakan serta program/kegiatan berikut pembiayaannya. RKPD disusun berdasarkan aspirasi dari semua pihak yang disampaikan melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat. RKPD ini disusun dengan mengacu kepada beberapa ketentuan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor :

1181/M.PPN/0212006
050/244/SJ

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
9. Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Provinsi Bali Tahun 2003-2008.
10. Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka semua pihak dalam merencanakan pembangunan di daerah Bali diharapkan mengacu pada dokumen tersebut karena memuat tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan usulan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN dan APBD serta sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau yaitu : Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan, dengan luas wilayah 5.636,66 Km² atau 0,29% dari luas Kepulauan Indonesia. Jumlah Penduduk Bali tahun 2005 sesuai data BPS adalah 3.378.500 jiwa.

Berdasarkan pola penggunaan lahan pada tahun 2005 Provinsi Bali terdiri dari kawasan permukiman sebesar 8,34%, persawahan 14,33%, kawasan hutan sebesar 22,51%, kawasan perkebunan/tegalan 44,45%, lahan kritis 8,21%, waduk/telaga alam 0,49% dan lain-lain sebesar 1,67%. Daerah Bali tidak memiliki sumber daya alam potensial yang bisa diolah sebagai sumber pendapatan, seperti tambang minyak, emas, kayu hasil hutan dan sebagainya.

Di bidang sosial-kemasyarakatan, kualitas kehidupan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi nasional berkepanjangan dan terjadi kelesuan industri pariwisata menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi penduduk di Bali. Pada tahun 2005 jumlah keluarga miskin di Daerah Bali sesuai hasil pendataan mencapai 147.044 Rumah Tangga Miskin (RTM).

Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat dan kebudayaan daerah yang dijiwai agama Hindu yang sarat dengan makna spritual. Kebudayaan Bali memiliki landasan etika dan estetika didukung oleh lembaga tradisional yang kuat seperti desa pakraman dan banjar adat sehingga menjadi ciri khas yang diharapkan mampu mencegah degradasi budaya sejalan dengan meningkatnya pengaruh budaya dari luar.

Kondisi keamanan dan ketertiban daerah Bali secara umum cukup baik, tertib dan terkendali. Hal ini tidak terlepas dari peran aparat keamanan beserta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah Bali. Kondisi yang kondusif ini diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian Bali dengan lebih cepat.

Kinerja pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil yang semakin meningkat dengan makin banyaknya penduduk yang memperoleh kesempatan belajar. Indikator yang paling jelas untuk menggambarkan hal tersebut, tercermin melalui peningkatan angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan. Indikator lainnya ditunjukkan dari prestasi yang mampu diraih oleh para siswa pada Ujian Akhir Nasional Tahun 2005. Untuk jenjang SMP menempati peringkat I Nasional, SMA IPA peringkat II Nasional, SMA IPS peringkat VI Nasional, SMA Bahasa peringkat XI Nasional serta SMK peringkat II Nasional dengan nilai rata-rata masing-masing 7,62 untuk SMP; 8,03 untuk SMA IPA; 7,19 untuk SMA IPS; 7,41 untuk SMA Bahasa dan 7,18 untuk SMK.

Pembangunan kesehatan juga penting sejalan dengan pembangunan dunia pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dari makin meningkatnya perilaku pola hidup sehat masyarakat Bali ditunjang sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumber daya manusia yang memadai sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Kemajuan lainnya ditunjukkan dari meningkatnya umur harapan hidup masyarakat sehingga mencapai 72,11 tahun pada tahun 2005.

Kondisi perekonomian daerah Bali sesungguhnya telah menunjukkan tanda-tanda kearah semakin membaik bila dilihat dari angka-angka indikator makro selama 3 tahun terakhir baik mengenai angka pertumbuhan maupun pendapatan perkapita masyarakat. Terwujudnya kondisi ekonomi seperti ini merupakan hasil dari upaya pemulihan ekonomi daerah Bali sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun upaya-upaya ini menjadi sirna, akibat terjadinya peristiwa Bom Bali Oktober 2005 dan kebijakan terhadap kenaikan harga BBM yang menyebabkan perekonomian daerah Bali semakin mengalami kemunduran sejalan dengan terganggunya industri pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah Bali.

Di sisi lain sektor pertanian dalam arti luas walaupun telah dilaksanakan berbagai program namun belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian daerah Bali. Demikian juga halnya terhadap dunia investasi belum menunjukkan tanda-tanda kearah pemulihan sehingga perluasan kesempatan kerja belum tercapai.

Kondisi infrastruktur jalan di provinsi Bali pada tahun 2005 adalah baik 45,47%, sedang 44,11%, rusak 8,25%, rusak berat 1,28%, Ketenagalistrikan dengan total pasokan sebesar 562 MW, sebanyak 200 MW dipasok dari sistem Jawa-Bali dengan elektrifikasi 100% desa sudah mendapat listrik. Dari sisi lingkungan Bali masih memiliki lahan kritis pada tahun 2005 seluas 36.675 hektar (28,1% dari luas kawasan hutan). Pembangunan infrastruktur daerah diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan, sehingga penurunan terhadap kuantitas maupun kualitasnya dapat dihindari. Sedangkan kondisi lingkungan mendapat perhatian yang lebih serius mengingat pembangunan lingkungan hidup akan turut memberi dampak terhadap kehidupan karena kerusakan lingkungan juga berarti kerusakan terhadap ruang lingkup kehidupan.

2.2 Permasalahan Pembangunan

Secara umum ada beberapa permasalahan dan tantangan pokok pembangunan daerah yang perlu diantisipasi pada tahun anggaran 2007 antara lain :

a. Bidang Sosial

Daerah Bali menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan derasnya penduduk pendatang setiap tahunnya yang mengakibatkan persaingan memperoleh kesempatan kerja semakin tinggi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum pulihnya sektor pariwisata sebagai akibat dari berbagai kejadian baik yang bersekala lokal, Nasional maupun Internasional mengakibatkan jumlah dan prosentase pengangguran mengalami peningkatan. Dengan kondisi seperti itu mengakibatkan juga tingginya jumlah penduduk miskin. Pada sisi lain kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja sumber daya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan; rendahnya kesejahteraan PNS; serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan. Upaya membangun kehidupan masyarakat Bali yang aman dan damai, dihadapkan pada tantangan dengan munculnya konflik komunal yang memanfaatkan sentimen adat. Sesungguhnya didalam komunitas masyarakat Bali sudah ada berbagai kearifan lokal, yang dapat menjadi

wadah komunikasi penyelesaian konflik seperti pemerintah dan lembaga-lembaga adat sebagai fasilitator. Akan tetapi fungsi dan perannya belum berjalan optimal.

Pembangunan pendidikan di Bali menunjukkan kinerja yang cukup baik namun akselerasinya masih perlu ditingkatkan. Masalah pendidikan di Provinsi Bali, tergambar pada kenyataan dengan masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, seperti antar penduduk kaya dan miskin, antar laki-laki dan perempuan, antar penduduk diperkotaan dan perdesaan serta antar daerah Kab/Kota. Disamping itu, menyangkut masalah mutu pendidikan adalah merupakan salah satu prioritas serius yang perlu ditingkatkan. Rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Bali antara lain disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik (guru), belum efektifnya manajemen pendidikan.

b. Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah Bali dilihat dari sisi makro ekonomi terjadi peningkatan pertumbuhan pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004, namun tingkat pertumbuhannya belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan masih terdapat berbagai masalah sosial ekonomi.

Pada sisi lain struktur perekonomian daerah Bali masih rentan terhadap berbagai gejolak, hal ini terbukti dengan terpuruknya sektor pariwisata pasca tragedi Bom Bali yang mengakibatkan perekonomian daerah Bali mengalami krisis.

Terpuruknya kepariwisataan Bali juga berdampak langsung pada menurunnya aktivitas industri kecil dan rumah tangga, karena permintaan akan produk ekspor non migas dari sektor industri kecil dan rumah tangga menurun. Sedangkan di sektor pertanian yang diharapkan mampu menyangga perekonomian daerah Bali juga mengalami kendala. Hal ini disebabkan masih rendahnya jumlah dan kualitas produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun ekspor, serta masih rendahnya kemampuan pengelolaan dalam proses produksi dan dalam pemasaran

hasil-hasil komoditas pertanian sehingga kebutuhan terhadap *supply* bahan baku untuk hotel dan restoran maupun usaha industri kecil masih tergantung pasokan dari luar dan ini berdampak pada rendahnya pendapatan petani.

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, sumberdaya air, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan mengalami permasalahan dalam hal terbatasnya kemampuan pembiayaan oleh pemerintah untuk pembangunan baru. Sehingga perlu dilakukan inovasi-inovasi di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.

Dalam pengembangan wilayah, tata ruang masih menjadi permasalahan tersendiri sebagai akibat belum berjalannya secara baik pengendalian pemanfaatan ruang, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi Perda Tata Ruang, arsitektur dan lingkungan. Pembangunan antar daerah Kab/kota, antar perkotaan dan perdesaan di Bali belum merata. Kesenjangan ini disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal, secara wilayah pembangunan juga cenderung terkonsentrasi di wilayah daerah Bali Selatan yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), sehingga dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah perlu lebih didorong dan difasilitasi pembangunan untuk Bali Timur, Bali Barat dan Bali Utara. Ketertinggalan tingkat kemajuan pembangunan wilayah juga disebabkan oleh kurangnya kreativitas dan inovasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang infrastruktur.

BAB III

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Tema

Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Tema Pembangunan Daerah Bali Tahun 2007 adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Budaya”***

3.2 Prioritas Pembangunan

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan daerah Bali serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Provinsi Bali 2003-2008 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan yang dituangkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

3.2.1 Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial

a. Kondisi

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Hal ini terjadi akibat belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, rasa aman serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan harus

dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama lintas pelaku, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Namun harus dipahami bahwa untuk dapat menanggulangi kemiskinan diperlukan inisiatif atau aktivitas orang miskin itu sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dan motivator.

Dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak program-program yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), berupa bantuan langsung yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat desa. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang diprioritaskan untuk meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja produktif, pengembangan usaha kecil dan menengah, perlindungan sosial masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Unit Pengelola Sarana/Kelompok Pemakai Sarana (UPS/KPS), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), Community Based Development (CBD) serta Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Namun program-program tersebut belum menunjukkan hasil optimal. Bahkan masalah kemiskinan menjadi semakin meningkat seiring dengan adanya krisis yang berkepanjangan, ditambah adanya peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 dan tanggal 2 Oktober 2005.

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 109.193 tahun 2003 menjadi 119.893 RTM pada tahun 2004 dan selanjutnya setelah dilakukan pendataan penduduk yang termasuk kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin berjumlah 147.044 RTM pada tahun 2005. Pada tahun 2006 penanggulangan kemiskinan menjadi program prioritas dalam pembangunan daerah Bali, merupakan langkah lintas sektor yang bersinergi dengan berbagai kebijakan dan program lainnya seperti penyediaan pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja bantuan sarana dan prasarana yang bersifat ekonomi produktif, termasuk upaya penggerakan usaha ekonomi mikro seperti upaya pengembangan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) dan pengembangan agrobisnis sebagai upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam pembangunan sosial, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang pesat namun masih perlu mendapat perhatian. Usaha-usaha pemerintah di bidang pembangunan sosial antara lain meliputi bantuan sosial baik bagi perorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, terlantar atau tersesat dan melakukan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Perkembangan pembangunan sosial dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar sebanyak 60.208 orang pada tahun 2004 meningkat menjadi 60.485 orang pada tahun 2005, jumlah lanjut usia terlantar dari 18.195 orang pada tahun 2004 menurun menjadi 18.027 jiwa pada tahun 2005. Demikian selanjutnya penyandang cacat pada tahun 2004 sebanyak 26.690 orang menurun menjadi 24.728 pada tahun 2005, anak nakal dari 2.519 orang pada tahun 2004 meningkat menjadi 3.246 orang pada tahun 2005. Korban penyalahgunaan narkoba juga mengalami peningkatan dari 557 pada tahun 2004 menjadi 772 tahun 2005, sedangkan gelandangan dan pengemis pada tahun 2005 berjumlah 2.217 orang.

Pada Tahun 2007 pembangunan sosial masih akan diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza, dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan partisipatif. Selain itu permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang lebih serius.

b. Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar.
- Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
- Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami masalah sosial.
- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Perluasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan prasarana dasar, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan beasiswa siswa bagi siswa kurang mampu
 - Bantuan operasional sekolah dan bantuan khusus murid
 - Pemberantasan buta aksara
 - Penyuluhan dan pertolongan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
 - Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi keluarga miskin
 - Meningkatkan cakupan pelayanan air pada kawasan kritis air
- Peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)
- Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan BUMDES
- Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan P2MD
- Program Bali sejahtera (CBD)
- Peningkatan SDM dan pelayanan administrasi
- Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial masyarakat, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pelayanan dan rehabilitasi sosial
 - Pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar
 - Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan
 - Penyediaan makan dan minum penghuni panti serta pelayanan administrasi
 - Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Revitalisasi Posyandu

3.2.2 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

a. Kondisi

Kondisi pendidikan saat ini belum mampu sepenuhnya memberi pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya penduduk buta

aksara yakni sebesar 15,67%, siswa putus sekolah mencapai 1614 orang dan rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Disamping itu pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan merupakan suatu keharusan yang bersifat mendesak guna menjawab tantangan pembangunan dalam rangka otonomi daerah dan persaingan global. Guna meningkatkan mutu pendidikan, maka kualitas guru/tenaga pendidik harus selalu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan untuk dapat menguasai materi/kurikulum pendidikan dengan lebih baik.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2005 107,14%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2005 94,58%. Kemudian APK SMP/MTS Tahun 2005 mencapai 91,98%, sedangkan APM nya mencapai 72,71%. Untuk tingkat SLTA/MA APK mencapai 66,55% dan APM mencapai 51,13%.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Hal ini tercermin dari indek pendidikan yang bervariasi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat Provinsi Bali terus mengalami peningkatan, antara lain dilihat indikator kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan prevalensi gizi buruk. Angka kematian bayi menurun dari 16,69 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 7,28 per seribu kelahiran hidup tahun 2005. Angka Kematian Ibu melahirkan 94,27 tahun 2004 menjadi 59,5 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Umur harapan hidup pada tahun 2005 adalah 72,11. Prevalensi gizi buruk 0,21% pada tahun 2004, menjadi 0,46% pada tahun 2005. Walaupun dari beberapa indikator derajat kesehatan tersebut Provinsi Bali telah melewati angka nasional tetapi secara umum status kesehatan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang makin merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai dengan akhir tahun 2005 telah tersedia 109 Puskesmas, 489 Puskesmas Pembantu, 119 Puskesmas Keliling. Sedangkan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebanyak 37 buah yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Meskipun demikian banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi.

Untuk itu diperlukan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar, terutama puskesmas dan jaringannya.

Khusus mengenai flu burung, saat ini telah menjadi isu global dan nasional yang memerlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih serius. Jumlah kumulatif kematian ternak unggas akibat flu burung sangat tinggi dan tersebar di seluruh Provinsi. Proses serangan flu burung pada manusia perlu diwaspadai karena dapat berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (*confirmed cases*) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat.

Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan harus lebih ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tata laksana kesehatan hewan dan manusia. Dalam kaitan ini telah disusun Rencana Strategis Nasional Pengendalian Flu Burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza 2006-2008 yang menjadi acuan bagi upaya lintas sektor dan acuan bagi kerjasama dengan lembaga internasional.

Upaya penanggulangan masalah gizi terutama difokuskan pada ibu hamil, bayi dan anak balita, karena mereka ini adalah golongan rawan yang paling rentan terhadap kekurangan gizi serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Masalah gizi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi menyangkut masalah sosial ekonomi, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan masalah gizi harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan dan ekonomi dengan fokus pada kelompok miskin.

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial untuk pelayanan kesehatan perlu terus diupayakan. Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial diharapkan dapat mendorong pemakaian obat generik esensial oleh masyarakat umum terutama bagi kelompok miskin, karena lebih terjangkau oleh masyarakat.

Pengawasan terhadap obat, makanan dan keamanan pangan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) menjadi hal sangat penting. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak bermutu, pangan yang berbahaya dan penyalahgunaan NAPZA. Dalam hal pengawasan pangan, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan zat-zat tambahan yang membahayakan.

b. Sasaran

Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.
- Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan.
- Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya kesehatan lingkungan dan pencegahan penyakit.
- Meningkatnya perilaku hidup sehat.

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan pendidikan anak usia dini
 - Penyelenggaraan pendidikan wajar 9 tahun
 - Penyelenggaraan kelompok belajar paket A,B,C dan Ujian Nasional.
 - Penyelenggaraan UAS dan UAN PLB
 - Pembinaan dan pemberian beasiswa anak berprestasi.
 - Penyusunan Kurikulum.
 - Pengembangan aktivitas dan mutu kepemudaan.
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidikan non formal.
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidikan SD, SMP dan SMA.
 - Peningkatan kompetensi guru.

- Peningkatan kualitas tenaga pengelola pendidikan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan sarana prasarana pendidikan anak usia dini
 - Bantuan rehabilitasi gedung SD/MI dan SMP/MTs serta pengadaan meubiler
 - Bantuan rehabilitasi gedung SMA/SMK
 - Pengadaan alat peraga dan laboratorium
 - Bantuan sarana prasarana sekolah rintisan dan berprestasi
 - Bantuan sarana prasarana sekolah kurang berprestasi
 - Peningkatan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
- Peningkatan pendidikan non formal, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan pendidikan SLB
 - Peningkatan pengembangan kegiatan belajar
 - Peningkatan sarana prasarana dan bahan bacaan perpustakaan
 - Peningkatan seni dan keolah-ragaan
 - Peningkatan kordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan media promosi dan informasi standar hidup sehat
 - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas serta laboratorium kesehatan
- Peningkatan dan pengembangan institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
- Peningkatan kordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kesehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
 - Peningkatan pelayanan dan masalah kesehatan
 - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- Meningkatkan prilaku hidup sehat, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan penyuluhan/promosi kesehatan
 - Peningkatan administrasi kantor

3.2.3 Peningkatan Kesempatan Kerja, Pengembangan Dunia Usaha dan Ekspor

a. Kondisi

Kondisi **Ketenagakerjaan** belum begitu baik, karena tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Berdasarkan perhitungan BPS jumlah angkatan kerja tahun 2005 sebanyak 2.002.171 orang, meningkat sebesar 4% dari tahun 2004 yaitu sebesar 1.924.805 orang. Dari jumlah tersebut yang terserap 1.895.741 orang, sisanya yang masih menganggur berjumlah 106.430 orang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali, meliputi:

- Kualitas SDM masih rendah, sehingga daya saingnya rendah di pasar kerja,
- Kesempatan kerja masih sempit terutama di sektor non pertanian, sebagai akibat belum pulihnya kondisi dunia usaha,
- Minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian rendah,
- Jumlah penduduk pencari kerja meningkat.

Industri Kecil dan Menengah di daerah Bali pengembangannya terbatas pada kegiatan industri kecil dan menengah, sebaliknya industri besar dan berat tidak dikembangkan, mengingat Bali tidak memiliki sumberdaya mineral. Industri yang dikembangkan disini diarahkan untuk mendukung industri pariwisata. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah lokasinya diarahkan melalui sentra-sentra industri yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yang jumlahnya mencapai 918 lokasi. Usaha Industri Kecil dan Menengah di daerah Bali pada tahun 2005 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 224.326 orang, dengan realisasi ekspor mencapai US \$ 398.425.468,91.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah di daerah Bali, adalah :

- Terbatasnya bahan baku lokal, sehingga didatangkan dari daerah lain.
- Kualitas produk belum mampu bersaing di pasar internasional.
- Kebutuhan modal kerja semakin besar akibat peningkatan biaya produksi.
- Belum terdaftarnya hasil produk/desain dalam HAKI dan merk.
- Kualitas SDM masih rendah.

Penanaman Modal/Investasi perkembangannya ditunjukkan oleh jumlah investasi di seluruh sektor, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk PMDN maupun dari luar negeri dalam bentuk PMA. Adapun surat persetujuan investasi (SP) untuk Provinsi

Bali yang diterbitkan baik PMA maupun PMDN selama tahun 2004 tercatat 141 SP yang terdiri dari: PMA sejumlah 131 SP dengan rencana investasi US \$ 308.502.025, PMDN sejumlah 10 SP dengan rencana investasi Rp 589.799.900.000. Dibandingkan dengan tahun 2005 sampai bulan Desember tercatat 157 SP yaitu PMA 149 SP dengan rencana nilai investasi US \$ 134.422.826 dan PMDN 8 SP dengan rencana nilai investasi Rp 2.826.413.000.425.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Provinsi Bali antara lain:

- Investasi yang ada tidak merata di seluruh Kab/Kota.
- Investor cenderung lebih berminat untuk berinvestasi di wilayah perkotaan, namun lahan terbatas dan mahal.
- Sarana dan Prasarana di luar kawasan perkotaan masih sangat terbatas.
- Promosi investasi belum terpadu.
- Pelayanan perijinan belum optimal dan persyaratan administrasi investor sering kurang lengkap.
- Investor kurang disiplin dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Investor yang sudah dapat Surat Persetujuan (SP) umumnya lambat mengurus Ijin Usaha Tetap (IUT).

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) kondisinya ditunjukkan oleh jumlah Koperasi sampai dengan akhir tahun 2004 sejumlah 2.330 unit dan tahun 2005 sebanyak 2.545 unit, , maka ada peningkatan sebanyak 215 Koperasi atau 8,45 %. Jumlah anggota koperasi tahun 2004 sebanyak 646.201 orang dan tahun 2005 sebanyak 731.176 orang, maka terjadi kenaikan sebanyak 84.975 orang (13,15%). Jumlah volume usaha koperasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 1.227,57 Milyar (127,84%) pertahun yaitu tahu 2004 sebesar Rp 960,21 Milyar dan tahun 2005 sebesar Rp 2.187,74 milyar. Asset koperasi meningkat Rp 587,09 Milyar (71, 16 %) dari tahun 2004 sebesar Rp 825,07 Milyar dan tahun 2005 sebesar Rp 1.412,16 Milyar. Modal sendiri naik sebesar Rp 88,24 Milyar

(26,72%) dari tahun 2004 sebesar Rp 330,27 Milyar dan tahun 2005 sebesar Rp 418,51 Milyar.

Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah di Bali tahun 2004, sebagai berikut :

- Sektor Perdagangan sebanyak 74.869 unit
- Sektor Industri Pertanian sebanyak 20.979 unit
- Sektor Industri Non Pertanian sebanyak 47.875 Unit,
- Sektor Aneka Jasa sebanyak 21.917 unit

Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah di Bali tahun 2005, sebagai berikut :

- Sektor Perdagangan sebanyak 75.618 unit
- Sektor Industri Pertanian sebanyak 21.187 unit
- Sektor Industri Non Pertanian sebanyak 40.187 Unit,
- Sektor Aneka Jasa sebanyak 22.135 unit

Dengan demikian jumlah pengusaha kecil dan menengah di Provinsi Bali dari tahun 2004 sampai tahun 2005 terjadi peningkatan untuk semua sektor, terkecuali sektor Industri Non Pertanian mengalami penurunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UKM dan Koperasi, adalah :

- Masih rendahnya daya saing ekspor produk UKM dan Koperasi,
- Masih rendahnya kualitas SDM dalam bidang kewirahusahaan, lemahnya daya inovasi dan kreatifitas serta profesionalisme dalam pengelolaan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- Masih rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen, yakni kemampuan UMKM dan koperasi yang berkembang saat ini belum cukup merata pada seluruh UMKM dan Koperasi.
- Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar.

- Terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis bagi pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta masih rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
- Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perijinan pendirian koperasi dan UKM.
- Masih rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam mengakses pasar dan penguasaan teknologi informasi dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang berubah sangat cepat.

Pariwisata kondisinya sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, iklim usaha, jaminan keamanan, dan tingkat kehandalan infrastruktur daerah. Sampai saat ini industri pariwisata masih merupakan salah satu andalan bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi PDRB Bali. Terjadinya tragedi bom Bali, serta merebaknya isu wabah penyakit, berdampak pada menurunnya kinerja kepariwisataan Bali bahkan Nasional. Secara nasional berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membangkitkan kembali citra industri pariwisata yang sempat terpuruk. Pada tahun 2004, memang terjadi peningkatan arus wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia, yaitu meningkat menjadi 5,3 juta orang atau naik sekitar 19,0 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Kunjungan wisman tersebut telah menghasilkan devisa negara sebesar US\$ 4,8 miliar atau 12,0 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun mengalami penurunan kembali setelah terjadinya bom Bali pada bulan Oktober 2005, dengan jumlah wisatawan turun menjadi sebanyak 5,0 juta orang atau turun 5,8 persen dari tahun 2004. Sementara itu, divisa yang diterima dari kunjungan wisman pada tahun 2005 mencapai US\$ 4,53 miliar atau turun 5,7 persen dari tahun sebelumnya.

Kondisi kepariwisataan Bali sebelum tahun 2005 sesungguhnya cenderung membaik. Hal ini terlihat dari jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2003 sebanyak 993.029 orang dengan rata-rata tinggal 11,20 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 548.592/hari. Tahun 2004 sebanyak 1.458.309 orang meningkat 46,85% dengan rata-rata tinggal 10,06 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 799.524/hari. Namun pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya 1.386.449 orang terjadi penurunan sebesar 4,93%, dengan rata-rata tinggal 9 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 801.000/hari. Dilihat jumlah wisatawan yang datang ke Bali, sebagian besar wisman didominasi oleh Jepang, Korea dan Australia. Untuk tahun 2006 kunjungan wisatawan mancanegara diprediksikan sebanyak 1.390.592 orang meningkat 0,30% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata tinggal 8,64 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 875.000/hari.

Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2003 sebanyak 1.986.058 orang dengan rata-rata tinggal 4,0 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 94.057/hari, serta tingkat hunian rata-rata 43,17%. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2004 sebanyak 2.916.618 orang dengan rata-rata tinggal 4,20 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 312.796/hari, serta tingkat hunian rata-rata sebesar 48,65%. Pada tahun 2005 sebanyak 2.687.064 orang dengan rata-rata tinggal 4,40 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 327.872/hari, serta tingkat hunian rata-rata 42,45%. Prediksi kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2006 sebanyak 2.781.184 orang dengan rata-rata lama tinggal 4,61 hari dan pengeluaran rata-rata Rp 343.675/hari, serta tingkat hunian rata-rata 39,78%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Bidang Kepariwisata adalah:

- Masih rendahnya daya saing industri pariwisata nasional dan belum optimalnya sinergi pembangunan pariwisata dengan pembangunan ekonomi sosial dan budaya dan persaingan yang semakin ketat antara negara-negara yang menjadi tujuan wisata.

- Belum meratanya penyebaran sarana dan prasarana pariwisata yang memadai di seluruh Kabupaten/Kota, seperti akses transportasi dan informasi.
- Belum mantapnya jaminan keamanan dari daerah tujuan wisata.
- Belum memadainya prasarana sanitasi lingkungan di beberapa obyek dan daya tarik wisata.
- Kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja pariwisata atau rendahnya daya saing SDM.
- Belum efektifnya promosi pariwisata.
- Bahan-bahan promosi pariwisata sangat terbatas.

Ekspor daerah Bali selama periode tahun 2001-2005, menunjukkan trend yang berfluktuasi dengan surplus tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu mencapai US \$ 498.969.473,16. Sedangkan pada tahun 2005, realisasi ekspor Bali menunjukkan angka penurunan menjadi US \$ 458.410.714,67 atau menurun sebesar 12,51%. Kondisi ini tidak terlepas dari tragedi Bom Bali yang sangat dirasakan oleh pelaku bisnis di Bali khususnya serta adanya bebas quota yang mulai diberlakukan Januari 2005.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekspor non migas Daerah Bali adalah :

- Rendahnya daya saing komoditas ekspor daerah Bali.
- Kurang proaktifnya lembaga ekspor dan dunia usaha dalam mengoptimalkan pangsa pasar luar negeri.
- Lemahnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen.
- Terbatasnya informasi pasar luar negeri.

b. Sasaran

Sasaran peningkatan kesempatan kerja, pengembangan dunia usaha dan ekspor pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya perkembangan dunia usaha
- Meningkatnya ekspor

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan peningkatan kesempatan kerja, pengembangan dunia usaha dan ekspor pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Membina dan meningkatkan keterampilan pencari kerja, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pendataan dan pengembangan bursa tenaga kerja
 - Pelatihan dan penempatan tenaga kerja
 - Pendayagunaan tenaga kerja
 - Peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri
- Membina dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pembinaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
 - Pembinaan lembaga dan pelatihan instruktur
 - Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan administrasi
- Mengembangkan unit-unit usaha dan lembaga ekonomi kerakyatan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan dan pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terfokus pada pengembangan komoditas unggulan dengan pola *klaster*, Temu Bisnis Kemitraan, Pelatihan Pengolahan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Makanan serta pelatihan Manajemen sederhana.
 - Meningkatkan standar pelayanan dan perlindungan konsumen serta produsen dengan penerapan standarisasi dan HAKI
 - Pengembangan kewirausahaan dan daya saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dengan meningkatkan pengelolaan UKM dan Koperasi, meningkatkan kemitraan usaha Pengusaha Kecil

- Menengah (PKM) dan Koperasi serta penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM dengan meningkatkan perkuatan permodalan usaha PKM dan Koperasi (pinjaman modal kerja pada UKM/Koperasi)
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan manajemen pengelolaan UKM/Koperasi
 - Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dengan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan perkuatan kelompok pengusaha kecil dan menengah, memberdayakan kelembagaan UKM dan Koperasi, memberdayakan usaha koperasi serta pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan administrasi
 - Pengembangan lembaga keuangan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan Desa Adat/Desa Pekraman
 - Koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Koperasi dan UKM
- Meningkatkan kinerja pelayanan perijinan investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengkajian dan pengembangan investasi dengan melakukan pengkajian profil investasi, identifikasi dan penyusunan potensi investasi data penanaman modal, meningkatkan jaringan informasi penanaman modal.
 - Mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan dengan promosi penanaman modal, forum konsultasi dan sosialisasi kebijakan penanaman modal, peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal.

- Mengendalikan penanaman modal dengan melakukan monitoring dan pembinaan penanaman modal, pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
- Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan administrasi
- Meningkatkan daya saing kepariwisataan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan kepariwisataan dengan meningkatkan dan pelestarian Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), melakukan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri memanfaatkan media elektronik, teknologi informasi dan media cetak serta memberikan penghargaan dalam pengembangan pariwisata budaya
 - Pengembangan dan pengelolaan produk wisata dengan meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan, meningkatkan pelayanan dan daya saing produk pariwisata, melakukan pembinaan dan pengendalian usaha sarana dan jasa pariwisata serta mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan administrasi
 - Koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan pariwisata dan kerjasama antar daerah
- Mendorong dan meningkatkan pemasaran dan daya saing ekspor daerah, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan meningkatkan dan mengembangkan pemasaran dan ekspor, memberdayakan pelaku perdagangan dalam dan luar negeri, promosi dagang di dalam dan luar negeri, melakukan monitoring harga stock barang kebutuhan pokok serta mengembangkan

pasar lelang daerah/penguatan kelembagaan pasar lelang agrobisnis

- Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan administrasi
- Koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan industri dan perdagangan

3.2.4 Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

a. Kondisi

Pembangunan **Pertanian** dalam arti luas, mencakup Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang merupakan penunjang kebutuhan sektor industri dan sektor pariwisata. Pertanian memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun regional, tidak hanya terhadap ketahanan pangan tetapi juga menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Juga berperan di dalam penyediaan lapangan kerja, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, memelihara nilai-nilai sosial dan budaya perdesaan serta pelestarian lingkungan. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Bali relatif sempit yaitu di bawah 0,5 ha. Alih fungsi lahan pertanian di daerah Bali cukup pesat sejalan dengan perkembangan pembangunan dengan penyusutan diperkirakan mencapai 1.000 ha per tahun.

Perkembangan produksi pertanian di daerah Bali dari tahun 2001-2005 untuk beberapa jenis komoditas, dapat digambarkan bahwa:

- Pertanian Tanaman Pangan, untuk produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,32% per tahun, wortel meningkat 35,83%, buah-buahan meningkat 3,89%, kentang dan kubis mengalami penurunan 5,98% dan 3,79%.
- Perkebunan, khususnya komoditas perkebunan rakyat seperti: kelapa dalam, kopi arabika, cengkeh, kakao, panili

dan tembakau arealnya mengalami penurunan, demikian juga produksinya menurun rata-rata 1,83% per tahun.

- Peternakan, dalam hal ini sapi potong populasinya meningkat 3,02% per tahun, babi menurun 2,08%, kambing menurun 4,09%, ayam buras menurun 0,4% per tahun, ayam ras petelor menurun 4,99%, ayam ras pedaging meningkat 16,24% dan ternak itik meningkat 12,49% per tahun.
- Perikanan dan Kelautan, produksinya meningkat rata-rata 13,93% per tahun yaitu dari 168.754 ton pada tahun 2001 menjadi 244.306,4 ton pada tahun 2005.

Dari segi kontribusi sektor primer (mencakup sektor pertanian) terhadap pembentukan PDRB daerah Bali mengalami peningkatan dari 21,37% pada tahun 2001 menjadi 22,22% pada tahun 2005.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah :

- Permasalahan *Pertanian Tanaman Pangan*, meliputi ketersediaan air sangat kurang terutama saat musim kemarau. Rata-rata kepemilikan lahan sempit, kebutuhan pangan yang semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk, meningkatnya alih fungsi lahan, minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian cenderung menurun, kualitas SDM dan tenaga kerja terbatas, sarana dan prasarana terbatas, permodalan dan akses pasar lemah (persaingan produk), fluktuasi harga relatif tinggi serta serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).
- Permasalahan *Perkebunan* meliputi adanya serangan hama penyakit, penerapan sistem dan usaha agribisnis belum utuh, dan kelembagaan kelompok tani masih lemah.
- Permasalahan *Peternakan* antara lain masih berjangkitnya penyakit hewan menular, rendahnya pendapatan petani

peternak, lemahnya dukungan permodalan, rendahnya kualitas SDM peternak.

- Permasalahan *Perikanan dan Kelautan*, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan dan pengelola ikan dalam menerapkan lptek bidang perikanan dan kelautan, terbatasnya sarana dan prasarana perikanan, masih adanya penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan (*Distructs Fishing*).

Pembangunan **Perdesaan** untuk daerah Bali diarahkan pada pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif di wilayah perdesaan seperti air bersih perdesaan, pengembangan jaringan irigasi desa, prasarana jalan inspeksi dan jalan poros desa. Berkenaan dengan pengadaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan berbagai kepentingan, berasal dari sungai dengan muara 162 buah, danau alam dan danau buatan 8 buah, mata air 500 buah, air bawah tanah dan air hujan. Kebutuhan air untuk irigasi dipergunakan untuk mengairi sawah baku seluas 103.899 Ha dialiri melalui prasarana irigasi teknis 29.516 Ha (28,41%), irigasi non teknis 73.207 Ha (70,46%) dan irigasi sederhana 1.176 Ha (1,13%). Jumlah bendung 452 buah, bangunan waduk/embung 4 buah, bangunan bagi 112 buah, saluran primer 773,932 km, saluran skunder 1.689,91 km, saluran tersier 2.670,139 km serta bangunan pelengkap lainnya. Berkenaan dengan pembangunan air bersih di perdesaan baru mencakup pelayanan sebesar 32,98 %. Disamping itu pembangunan irigasi desa, pelayanannya baru mencakup seluas 56.395 ha dan sawah tadah hujan seluas 188 ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan meliputi :

- Masih rendahnya kemampuan masyarakat di wilayah perdesaan dalam berwirausaha khususnya dalam

mengakses permodalan dan penerapan teknologi dibidang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

- Keterbatasan sumber air baku, baik sumber air baku air bersih maupun sumber air irigasi.
- Belum memadainya kondisi jaringan jalan inspeksi dan jalan poros desa.
- Rusaknya jaringan irigasi dan belum memadainya jaringan air bersih.

b. Sasaran

Sasaran peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah perdesaan
- Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian
- Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan pembangunan bidang pertanian dan perdesaan pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Memperkuat ketahanan pangan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan sarana dan prasarana
 - Penyebaran dan pengembangan bibit dan benih
 - Pemberantasan hama dan penyakit
 - Penanganan panen dan pasca panen
- Pengembangan agribisnis, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian
 - Peningkatan teknologi panen dan pasca panen
 - Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura

- Mendorong peningkatan SDM dan kelembagaan sektor pertanian serta meningkatkan promosi, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pemberdayaan kelompok wanita dan pemuda tani
 - Melakukan pembinaan dan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hewan
 - Meningkatkan promosi dan pemasaran
 - Peningkatan sarana dan prasarana dan pelayanan administrasi
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pertanian
- Mengembangkan sarana prasarana pedesaan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
 - Konservasi danau dan sumber air lainnya
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

3.2.5 Pemberdayaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

a. Kondisi

Kebudayaan Bali merupakan salah satu kebudayaan yang sangat unik dengan jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai Universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali. Konsep spiritual yang kuat serta lokal genius membuat kebudayaan Bali bermutu tinggi.

Dalam upaya penggalian, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya dilakukan dengan pemunculan melalui revitalisasi dan peningkatan kualitas, yang dilaksanakan melalui pembinaan terhadap potensi dan sumber seni budaya Bali dengan berpegang pada Konsep Tri Hita Karana dan Tri Mandala. Pelaksanaan Pesta

Kesenian Bali (PKB) secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 1979 secara terus menerus setiap tahunnya.

Terkait dengan dinamika lokal, nasional dan global yang terakselerasi melalui perkembangan pendidikan, teknologi, Informasi, pariwisata kebudayaan dan agama dihadapkan berbagai peluang dan tantangan. Warisan Budaya Bali tercatat sangat banyak dan beragam memiliki ciri-ciri khas yang unik sebagai warisan budaya etnik , nasional dan dunia.

Di bidang kebudayaan, strategi pembangunan daerah Bali yang berwawasan budaya masih menempatkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional yang merupakan potensi dasar yang kuat dan telah berakar di masyarakat Bali. Kebudayaan daerah yang dijiwai oleh Agama Hindu dan filsafat Tri Hita Karana merupakan seluruh hasil dari cipta, rasa dan karsa sebagai persembahan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Sasaran

Sasaran Pemberdayaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Bali pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya pemahaman dan pelestarian kebudayaan daerah
- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah
- Meningkatnya pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian daerah
- Meningkatnya ketahanan sosial budaya
- Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan Pemberdayaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Bali pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Meningkatkan pemahaman dan pelestarian budaya daerah, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- Pengembangan seni dan budaya daerah.
- Pelestarian dan aktualisasi budaya
- Pendataan dan penelusuran naskah lontar milik masyarakat
- Lokakarya dan alih aksara lontar serta bahasa dan sastra Bali
- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan peran Desa Pekraman, subak dan skaa-skaa
 - Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya
 - Utsawa Dharma Gita
 - Peningkatan sarana prasarana, pemeliharaan koleksi dan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian daerah, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali
 - Pembinaan dan pengembangan seni budaya
 - Promosi kebudayaan daerah
 - Peningkatan sarana prasarana dan administrasi perkantoran Taman Budaya
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Kerjasama pelestarian warisan budaya
 - Penyuluhan sejarah perjuangan, peningkatan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
 - Peningkatan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan pembinaan keagamaan
 - Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

- Peningkatan upacara keagamaan
- Peningkatan pelayanan administrasi

3.2.6 Penegakan Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

a. Kondisi

Pembangunan Hukum dan HAM di daerah ditujukan pada terciptanya kepastian hukum, keadilan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat dan tersedianya produk-produk hukum yang cukup dan efektif, baik produk hukum pusat maupun daerah. Produk-produk hukum dimaksud adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan hukum di daerah diwarnai oleh adanya dinamika dan perubahan masyarakat, meningkatnya kejahatan, masih adanya produk hukum yang tidak harmonis antara yang satu dan yang lainnya sehingga diperlukan pengaturan serta penyesuaian kembali produk-produk hukum yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, masyarakat merasakan bahwa penegakan hukum belum berpihak kepada kebenaran. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran hukum penegak hukum.

Dalam upaya Penegakkan Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, masih diperlukan peningkatan pemahaman HAM oleh masyarakat, sehingga setiap orang baik sebagai warganegara maupun pribadi, dapat diberikan perlindungan dan penghormatan hak azasinya seperti yang diharapkan.

Dengan upaya-upaya seperti tersebut, diharapkan pembangunan hukum dan HAM di daerah dapat menciptakan

kepastian hukum, keadilan, ketentraman dan keamanan masyarakat serta tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam rangka pembangunan dan penciptaan ketentraman dan ketertiban, pengaruh lingkungan baik strategi nasional, regional maupun global perlu mendapatkan perhatian agar tercapainya sasaran menyeluruh yang meliputi aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ketentraman dan keamanan adalah membentuk Badan Koordinasi Pengamanan Daerah Bali (BKPD) dengan melibatkan semua unsur terkait. Untuk mendukung aktivitas dari lembaga ini dibutuhkan prasarana dan sarana keamanan untuk membantu mendeteksi secara dini setiap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di tempat-tempat yang strategis.

Pembangunan keamanan dan ketertiban merupakan salah satu bagian dari pembangunan pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan segenap komponen yang ada di dalam masyarakat. Kondisi keamanan daerah Bali segera pulih kembali sebagai akibat terjadinya kasus bom Bali tahun 2002. Untuk itu partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam ikut menciptakan rasa aman, nyaman, damai dan sejahtera di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suasana aman, damai, tertib dan penuh toleransi merupakan syarat mutlak di dalam proses pembangunan.

Dalam pembangunan Penegakkan Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat masih ditemukan permasalahan antara lain :

- Masih adanya produk hukum yang tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
- Kualitas dan keterampilan aparat penegak hukum masih belum memadai.
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM
- Belum terkoordinasinya sistem pengamanan daerah
- Masih tingginya tingkat kriminal

Penegakan Hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan dengan SDM aparat yang berkualitas, belum memadai sehingga upaya mewujudkan *Good Governanunce* tidak bisa optimal. Untuk mendukung upaya tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan :

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan produk hukum, pemahaman hukum dan HAM
- Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penegakkan produk-produk hukum
- Meningkatkan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum.
- Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

b. Sasaran

Sasaran Penegakan Hukum Dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan HAM
- Meningkatnya kualitas aparat penegak hukum
- Meningkatnya produk hukum
- Meningkatnya rasa aman

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan Penegakan Hukum Dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan produk hukum, pemahaman hukum dan HAM, dengan fokus dan kegiatan proritas sebagai berikut :
 - Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan/Intruksi Kepala Derah
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum serta sistem informasi hukum

- Penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum
- Orientasi, sosialisasi dan pemasyarakatan serta monitoring dan evaluasi HAM
- Koordinasi pembangunan hukum dan pelayanan administrasi
- Meningkatkan pembinaan, bantuan hukum, penegakan hukum dan produk-produk hukum, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda
 - Penghimpunan produk hukum, evaluasi perda dan awig-awig desa pakraman
 - Advokasi dan monitoring penyelesaian sengketa hukum serta penyusunan produk hukum
- Meningkatkan ketentraman, keteriban dan perlindungan masyarakat, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Perbekalan pemantapan fungsi jaring deteksi dini dan diklat inteligen
 - Melaksanakan operasi/koordinasi komunikasi inteligen
 - Peningkatan sarana prasara dan pelayanan administrasi
 - Peningkatan pengendalian peraturan daerah dan kependudukan
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan tenaga kerja
- Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran bela negara, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan dan pemberdayaan partai politik
 - Peningkatan kesadaran bela negara
 - Peningkatan Tim Reaksi Cepat dan Satkorlak

- Sosialisasi pelaksanaan PILKADA Gubernur

3.2.7 Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

a. Kondisi

Sistem pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat. Perubahan tersebut meliputi struktur dan tata pemerintahan yang mengharuskan Pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) guna terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat penyelenggara negara termasuk di daerah. Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* meliputi : partisipasi penegakan hukum, transparansi, kesetaraan daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik antara lain masih banyaknya aparat yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik disamping masih perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah menuju pada *good governance* telah dilaksanakan kegiatan seperti

pelaksanaan diklat teknis fungsional, diklat penjurangan, beasiswa dan lain-lain.

Jumlah PNS pada badan-badan unit kerja Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2004 sebanyak 1426 orang dan tahun 2005 sebanyak 1474 orang meningkat rata-rata 1,02 % , PNS pada Dinas-dinas unit satuan kerja Provinsi Bali sebanyak 4436 orang dan tahun 2005 sebanyak 4486 orang, jumlah PNS pada biro-biro satuan kerja Setda Provinsi Bali tahun 2004 sebanyak 727 orang dan tahun 2005 sebanyak 727 orang. Sedangkan jumlah PNS pada Kantor Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Bali tahun 2004 sebanyak 144 orang dan tahun 2005 sebanyak 144 orang.

b. Sasaran

Sasaran peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah
- Meningkatnya pelayanan publik

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah
 - Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah
 - Peningkatan sarana prasarana aparatur pemerintah
 - Peningkatan pengawasan aparatur pemerintah

- Meningkatkan sistem dan prosedur kerja aparatur pemerintah, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan kelembagaan perangkat daerah
 - Peningkatan kearsipan Pemerintah Daerah
 - Pemantapan koordinasi dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas penyebarluasan informasi
 - Peningkatan pengelolaan sumber pendapatan dan keuangan daerah
 - Pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan

3.2.8 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

a. Kondisi

Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan kegiatan untuk mendukung peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pembangunan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan dan tetap menyesuaikan pada kondisi serta kemampuan yang ada dengan menitik beratkan pada pemeliharaan, untuk dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang telah ada. Kegiatan peningkatan dan pembangunan infrastruktur baru dilaksanakan secara lebih selektif dengan peningkatan peran investasi swasta.

Infrastruktur jalan yang ada di Bali adalah 6.732,95 Km, dengan status Jalan Nasional 501, 64 Km (7,45%), Jalan Provinsi 839,88 Km (12,47%) dan jalan Kabupaten 5.391,44 Km (80,08%). Dengan kondisi keseluruhan mengalami perbaikan pada tahun 2005 bila dibandingkan dengan tahun 2004. Kondisi tahun 2004 adalah baik

45,47%, sedang 44,27%, rusak 8,97% dan rusak berat 1,29% menjadi baik 46,36%, sedang 44,11%, rusak 8,25% dan rusak berat 1,28% pada tahun 2005. Prasarana perhubungan lainnya juga mengalami peningkatan fasilitas, seperti pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dan Padang Bai serta Bandara Internasional Ngurah Rai.

Kondisi ketenagalistrikan pada tahun 2006 di Provinsi Bali dengan total pasokan/pembangkitan energi listrik di Bali sebesar 562 MW yang mencakup daya mampu kabel laut sebesar 200 MW dan pembangkitan di Bali sebesar 362 MW (Pesanggaran, Gilimanuk dan Pamaran). Tahun 2006 elektrifikasi kelistrikan di Bali: 100% desa berlistrik dan 87 dusun belum terlistrik (meliputi kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Bangli) dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Bali yang mencapai 11,2 % per tahun.

Mengenai Lingkungan Hidup Provinsi Bali memiliki hutan seluas 130.686,01 ha (23,2% dari luas wilayah) dengan total luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan pada Tahun 2004 seluas 55.313 ha (42,3 % dari luas kawasan hutan). Melalui kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2005, luasan lahan kritis berkurang 14,2% menjadi seluas 36.675 (28,1% dari luas kawasan hutan). Hingga tahun 2006 penanganan lahan kritis melalui kegiatan GERHAN dan Gerakan Bali Hijau kondisi lahan kritis telah mencapai luasan 28.638 ha, sehingga sisa lahan kritis yang belum direhabilitasi dan direboisasi seluas 26.675 ha (20,4% dari luas kawasan hutan). Pengamanan daerah pantai dari abrasi secara bertahap terus diupayakan .

Penataan ruang dan penataan bangunan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan, sebagai pedoman perumusan kebijakan dalam pemanfaatan ruang serta pedoman bagi penataan ruang kabupaten/kota. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dilakukan untuk kawasan prioritas sesuai arahan Perda

No. 3 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.

Pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan, walaupun cakupan pelayanan telah mencapai 71,20 % untuk perkotaan dan 32,98 % untuk perdesaan namun kualitas pelayanan cenderung menurun akibat turunnya kapasitas sumber air baku. Pelayanan air limbah sistem perpipaan dan non perpipaan sedang diupayakan terus penanganannya serta peningkatan sistem penanganan persampahan. Upaya pelestarian arsitektur tradisional Bali sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2005 tentang Arsitektur dan Bangunan Gedung, terus diupayakan peningkatannya.

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup pada tahun 2007 adalah :

- Meningkatnya kondisi dan bertambahnya panjang jalan dan jembatan.
- Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan.
- Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas.
- Terlaksananya pembuatan percontohan pembangkit listrik hibrida dan profil energi.
- Terlaksananya pembinaan pemakaian air tanah dan pembangunan museum gunungapi Batur.
- Meningkatnya rehabilitasi kawasan hutan melalui pelaksanaan GERHAN dan Bali Hijau.
- Terlindunginya daerah pantai dari abrasi.
- Meningkatnya cakupan pelayanan air menjadi air limbah sistem perpipaan.
- Tersusunnya RDTR Kawasan.
- Tersedianya acuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Meningkatnya kualitas penataan bangunan.

c. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup pada tahun 2007 diarahkan pada :

- Pembangunan jalan dan jembatan dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 - Rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Pembinaan teknik, program dan pengujian ke PU-an
 - Peningkatan aparatur dan pelayanan administrasi
- Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Perencanaan prasarana fasilitas perhubungan
 - Pengadaan/pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
 - Pengawasan dan pengendalian pelayanan perijinan dan penyuluhan lalu lintas.
 - Pengkajian dan perencanaan angkutan umum SARBAGITA
 - Peningkatan sarana prasarana, pelayanan angkutan, penyebarluasan informasi
 - Pelayanan administrasi perkantoran bidang perhubungan
 - Pengadaan mobilitas kendaraan dinas operasional
- Pembinaan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Pengembangan listrik perdesaan
 - Pengelolaan, konservasi dan rehabilitas sumber daya mineral
 - Pembinaan dan pengawasan pertambangan
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan SDA dan LH

- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Rehabilitasi hutan dan lahan
 - Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, peningkatan sarana prasarana dan pelayanan administrasi
 - Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Pengamanan daerah pantai
 - Peningkatan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup serta pelayanan administrasi
- Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
 - Penyusunan perencanaan teknis air baku
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sumber daya air
- Penataan ruang dan penataan bangunan, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Perencanaan, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - Penataan bangunan dan lingkungan
 - Penataan aset daerah dan pengadaan perlengkapan
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB IV

KERANGKA MAKRO EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4.1 Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2005 dan Perkiraan Tahun 2006

Peningkatan pembangunan ekonomi pada tahun 2005 digambarkan oleh pencapaian angka-angka indikator makro ekonomi. Secara umum makro

ekonomi tahun 2005 cenderung semakin membaik terlihat dari terjadinya peningkatan pencapaian angka-angka makro ekonomi dari tahun sebelumnya. Dampak Bom Bali Oktober 2005 belum memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah Bali Tahun 2005, namun dampaknya diprediksi akan terlihat nyata pada tahun 2006. Pada Tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Daerah Bali direncanakan sebesar 4,05%, namun berdasarkan hasil penghitungan realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,56%, dan angka ini lebih tinggi dari tahun 2004 sebesar 4,62%. Struktur perekonomian daerah Bali masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 64,47%, sedangkan sektor primer 20,95% dan sektor sekunder sebesar 14,57%. Dari sembilan sektor ekonomi, yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Bali adalah sektor pertanian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa, sedangkan yang memberikan kontribusi negatif adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi. Khusus sektor pertanian telah mengalami peningkatan dari 20,74% pada tahun 2004 menjadi 20,29% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian telah mampu memberikan peran yang lebih besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain target PDRB perkapita sebesar Rp 10,05 juta tahun 2005 belum tercapai, karena realisasi PDRB perkapita hanya mampu mencapai angka Rp 9,890 juta dan ini lebih baik dibandingkan tahun 2004 yang hanya Rp 8,532 juta. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk sebagai salah satu faktor pembagi.

Tingkat inflasi pada tahun 2005 mencapai 11,31% lebih besar dari yang diperkirakan sebesar 5 - 7 %. Tingkat inflasi yang cukup tinggi ini disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan harga-harga barang menjadi meningkat dan daya beli semakin menurun. Pertumbuhan penduduk daerah Bali diperkirakan sebesar 0,94% pada tahun yang sama, sedangkan realisasinya mencapai 1,34%. Hal ini disebabkan karena adanya migrasi ke daerah Bali. Angka kesempatan kerja pada tahun 2005 mencapai 1.895.741 orang, sedangkan angka angkatan

kerja sebanyak 2.002.171 orang sehingga jumlah pengangguran mencapai 106.430 orang.

Perkiraan ekonomi daerah Bali tahun 2006 akan sangat tergantung pada perkembangan sektor pariwisata yang pada saat ini masih mengalami kelesuan akibat dari pengaruh Bom Bali Oktober 2005. Target pertumbuhan perekonomian daerah Bali sebesar 5,5% kemungkinan sulit untuk direalisasikan karena produktivitas beberapa sektor ekonomi tidak memberikan kontribusi sesuai dengan yang ditargetkan. Demikian pula dengan dukungan investasi belum mampu menjamin terutama investasi yang berasal dari swasta/dunia usaha karena kondisi belum kondusif.

Dari segi struktur ekonomi peranan sektor jasa diperkirakan akan menurun sejalan dengan belum pulihnya kunjungan wisatawan ke daerah Bali serta belum pulihnya sektor-sektor jasa lainnya. Tingkat inflasi diperkirakan dapat ditekan antar 6 - 7 % dengan asumsi tidak terjadi lagi kenaikan harga BBM.

Yang paling mengkhawatirkan adalah upaya untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar sulit direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan karena sektor-sektor seperti pariwisata dan industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja tidak berkembang dengan baik, sehingga masalah pengangguran akan menjadi tantangan yang berat.

4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Bali Tahun 2007

Perkiraan kondisi perekonomian daerah Bali tahun 2007 dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yaitu :

- a. Harga minyak yang cenderung semakin meningkat dipasaran internasional dan kurang stabil akan berpengaruh terhadap perekonomian negara dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
- b. Para investor kurang tertarik menanamkan modalnya karena terbatasnya potensi yang dimiliki disamping belum adanya kepastian hukum dan birokratisasi perijinan.

- c. Faktor keamanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata dimana pariwisata memerlukan kondisi keamanan yang kondusif.
- d. Nilai ekspor produksi lokal tidak mampu bersaing dipasaran internasional sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah.

4.3 Tantangan Pokok

Adapun tantangan pokok yang dihadapi pembangunan daerah Bali pada tahun 2007 adalah :

- a. Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Bali masih cukup banyak yaitu 147.044 RTM. Program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja sehingga akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat kompleks sehingga memerlukan perhatian yang sangat serius didalam penanganannya. Segala daya dan upaya hendaknya dikerahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

- b. Masih tingginya jumlah pengangguran

Jumlah pengangguran pada tahun 2005 mencapai 106.430 orang diperkirakan meningkat menjadi 108.557 orang pada tahun 2006 sebagai akibat dari perkembangan perekonomian yang diperkirakan masih kurang baik sebagai dampak Bom Bali Oktober 2005. Upaya penurunan angka pengangguran akan terkait dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka pengangguran akan menjadi beban bagi pemerintah dan berdampak kurang baik bagi kehidupan sosial masyarakat.

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk memecahkan permasalahan - permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran, adalah cukup berat mengingat terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai

program yang diperlukan disamping juga terbatasnya investasi dan lesunya perkembangan industri pariwisata.

d. Terbatasnya Sumber Daya

Pembangunan yang dilaksanakan memerlukan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta sumber dana. Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sehingga mendatangkan dari luar daerah.

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah Bali baik sumber daya alam maupun sumber pendapatan untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan untuk mensejahterakan masyarakat pembangunan hendaknya dilaksanakan berkesinambungan. Kondisi seperti ini juga menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali.

4.4 Arah Kebijakan Makro Ekonomi

Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2007 diarahkan untuk memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Terbatas kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dengan mengurangi berbagai hambatan. Arah kebijakan lainnya adalah mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dan juga pendapatan masyarakat dengan mengupayakan pemerataannya sehingga mampu mengurangi kesenjangan. Disamping itu pula mendorong pertumbuhan investasi dan ekspor non migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan penyederhaan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan, menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan penyediaan infrastruktur.

Kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain mendorong pembangunan disektor pertanian dan industri kecil. Pembangunan dikedua sektor ini perlu terus

ditingkatkan karena potensial dalam membuka kesempatan kerja yang lebih banyak, sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya pendukungnya.

4.5 Proyeksi Makro Ekonomi Tahun 2007

Dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah seperti kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja serta pengembangan dunia usaha maka pembangunan perekonomian hendaknya mampu dilaksanakan dan diwujudkan. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja, serta peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sesuai dengan kebijakan pembangunan yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, maka sasaran makro ekonomi daerah Bali tahun 2007 sebagai berikut :

4.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2005 dan prediksi tahun 2006 serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sektor ekonomi yang dimiliki, masalah keamanan, perkembangan ekonomi nasional serta asumsi-asumsi lainnya maka pertumbuhan ekonomi daerah Bali tahun 2007 direncanakan sebesar 5,85%. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut maka nilai tambah atau produktivitas dari sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri kecil, transportasi dan komunikasi serta perdagangan hotel dan restoran hendaknya mampu ditingkatkan. Demikian juga halnya dari sisi konsumsi, investasi dan ekspor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian dari laju pertumbuhan hendaknya mampu ditingkatkan. Disamping itu pula yang perlu dikendalikan adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat agar tidak mengganggu target pencapaian angka pertumbuhan ekonomi.

4.5.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, maka target PDRB Daerah Bali atas dasar harga berlaku direncanakan sebesar Rp 39,176 trilyun. Untuk itu seluruh sektor ekonomi

dibangkitkan agar bisa memberikan nilai tambah sesuai dengan yang diharapkan. Target tersebut dapat diwujudkan apabila produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga hendaknya dapat diupayakan agar lebih stabil.

4.5.3 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian daerah Bali masih tetap didominasi oleh peranan sektor tersier yang pada tahun 2007 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah Bali sebesar 62,31%. Dalam hal ini sektor perdagangan, hotel dan restoran diharapkan memberi kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya seperti angkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan pertambangan memberi kontribusi sebesar 21,68 % serta sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik, gas dan air bersih serta bangunan diharapkan memberi kontribusi sebesar 16.03 %.

4.5.4 Pendapatan Perkapita

Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85% diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007 PDRB perkapita direncanakan sebesar Rp 11,188 juta, yang diikuti oleh tingkat pemerataan yang lebih baik sehingga memperkecil kesenjangan ekonomi.

4.5.5 Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka laju inflasi agar dapat dikendalikan supaya tidak sampai mencapai angka diatas 10%. Pada tahun 2007 tingkat inflasi diperkirakan sebesar 6 - 7%. Tingkat inflasi disamping diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah juga diharapkan mampu merangsang gerak perekonomian daerah.

4.5.6 Kesempatan Kerja

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 diperkirakan menjadi 2.039.368 orang. Melalui pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang diperkirakan sebanyak 1.938.266 orang. Dengan besarnya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja sehingga masih terdapat pengangguran yang diperkirakan pada akhir tahun 2007 sebanyak 101.102 orang, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 108.557 orang.

4.5.7 Kemiskinan

Salah satu program prioritas dari pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan. Pemerintah berupaya untuk dapat mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan maka pada tahun 2007 diharapkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 3.500 RTM.

4.5.8 Pembiayaan Pembangunan

Untuk membiayai program-program pembangunan pada tahun 2007 serta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85% direncanakan kebutuhan dana sebesar Rp 8,65 trilyun, yang bersumber dari dana pemerintah sebesar Rp 4,64 trilyun yang terdiri dari APBD Provinsi (belanja langsung) sebanyak Rp 500 milyar dan APBD Kab/Kota sebesar Rp 2,875 trilyun, serta dana dekonsentrasi sebesar Rp 1,320 trilyun sedangkan sisanya bersumber dari dunia usaha/swasta sebesar Rp 3,575 trilyun dan swadaya masyarakat Rp 380 milyar. Dengan demikian proporsi pembiayaan pembangunan antara pemerintah dan swasta adalah 54% berbanding 46%. Peranan sektor swasta akan terus ditingkatkan dimasa mendatang seiring dengan upaya pemulihan ekonomi sehingga proporsi pembiayaan pembangunan bisa mencapai 30% pemerintah dan 70% swasta. Khusus mengenai APBD Provinsi sumber pembiayaan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 704,923 milyar dan dari dana

perimbangan sebesar Rp 421,847 milyar yang keseluruhannya berjumlah Rp 1,126 trilyun.

Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam menyusun pembiayaan tersebut antara lain adalah (1) Kondisi ekonomi tetap stabil, (2) Alokasi dana perimbangan dan dana APBN tidak mengalami penurunan, (3) Perkembangan Industri pariwisata Bali semakin membaik, (4) Tidak terjadinya kebijakan kenaikan harga BBM; (5) Tingkat Inflasi tidak melebihi angka dua digit.

Tabel 1. Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahun 2007

No	Sumber Pembiayaan	Tahun 2007 (Milyar)
1	APBD Kabupaten/Kota (Belanja Langsung)	Rp 2.875,00
2	APBD Provinsi (Belanja Langsung)	Rp 500,00
3	Dana Dekonsentrasi	Rp 1.320,00
4	Swadaya Murni	Rp 380,00
5	Swasta/Dunia Usaha	Rp 3.575,00
	TOTAL	Rp 8.650,00

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pencapaian sasaran pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD 2007 maka seluruh SKPD hendaknya merencanakan dan melaksanakan program sesuai arah kebijakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan ekonomis, transparansi, akuntabel serta partisipatif. Disamping itu pula sinkronisasi atau keterpaduan antar kegiatan, antar bidang dan antar wilayah perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih yang pada akhirnya mengurangi manfaat dari keberhasilan pembangunan. Agar dapat mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi maka pelaksanaan forum Musrenbang dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi dan pelaksanaan Forum SKPD perlu lebih dimantapkan.

RKPD merupakan acuan bagi seluruh SKPD, masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaedah-kaedah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD, masyarakat dan dunia usaha diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2007 sesuai yang tertuang dalam RKPD.

2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2007 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan baik forum SKPD maupun Musrenbang maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2007 sebagai lampiran dari RKPD.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan serta pengawasan pembangunan.
5. Pada akhir tahun anggaran setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Gubernur.

